

ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Maulan Irwadi, S.E., M.Si., Ak. CA

Dosen Prodi Akuntansi Politeknik Anika Palembang

Email : irwadi1@yahoo.co.id

Mohammad Aryo Arifin, SE., M.Si., Ak

Dosen Universitas PGRI Palembang

Email : aryo_arifin@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012-2016. Objek penelitian ini pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Data yang digunakan adalah data data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 sampai dengan 2016. Teknik analisis yang digunakan yaitu Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyatakan tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2012 dan 2013 sangat efektif, namun pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 cukup efektif. Dan tingkat kriteria efisiensi anggaran PAD secara keseluruhan berada pada kriteria cukup efisien.

Kata kunci: *Anggaran, Realisasi Anggaran, Kinerja.*

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik didaerah masing-masing.

Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Laporan Realisasi Anggaran yang terjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) belum bisa dikatakan Efektif, hal tersebut terjadi karena sering kali antara realisasi anggaran dengan target anggaran tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Oleh karena itu

mengetahui tingkat efektivitas dalam penilaian kinerja keuangan sangatlah penting karena jika realisasi anggaran tersebut tidak efektif, maka akan berpengaruh terhadap kemajuan pada instansi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin”**..

A.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan laporan realisasi anggaran.
2. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam menghitung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

A.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui hasil kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)

B. LANDASAN TEORI

B.1 Pengertian anggaran

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (PSAP 01 Anggaran : lampiran 1.02), Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang

disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:69), “Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.”

B.2 Tujuan dan Karakteristik Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2014:50) Anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun karakteristik anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Dinyatakan dalam satuan keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

B.3 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). adalah sebagai berikut; Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Menurut Halim (2014:284) menyatakan bahwa “laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.”

B.4 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (PSAP 02Manfaat Laporan Realisasi Anggaran : lampiran 1.03) adalah sebagai berikut; Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaandari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber - sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

mendanaikegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan caramenyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD);
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B.5 Menilai Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi (2016;140) menyatakan bahwa “untuk menilai kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan diantara nya sebagai berikut:

1. Analisis varians (selisih)

Analisis varians (selisih) pada umumnya digunakan untuk menganalisis pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi.

2. Analisis Rasio Keuanagan

a. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{persamaan 1}$$

- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah

pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah

provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan Keuangan Deaerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pemdaptan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots\text{persamaan 2}$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitungn dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari

pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandiriannya keuangan daerahnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots\text{persamaan 3}$$

d. Rasio Efektifitas
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan

realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots\text{persamaan 4}$$

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Tabel 1
Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

C. METODOLOGI PENELITIAN

C.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data, penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

C.2 Jenis-Jenis Data

Menurut Sugiono (2015: 223) jenis data dapat dibedakan menjadi:

1. Data Primer
Data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

Data yang peneliti gunakan sebagai bahan analisis adalah data data skunder yang nantinya akan diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada kabupaten Musi Banyuasin.

C.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai bahan analisis adalah teknik dokumentasi dan wawancara yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada kabupaten Musi Banyuasin.

C.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kuantitatif deskriptif tentang laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan dengan membandingkan antara kenyataan riil dengan teori dan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan yang dianggarkan.

D. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

D.1 Hasil Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data penelitian guna menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang sesuai dan relevan dengan kondisi sebenarnya. Temuan ilmiah digambarkan oleh data-data yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis laporan realisasi anggaran pada badan pengelolaan dan keuangan aset daerah (BPKAD) kabupaten Musi Banyuasin periode 2012 sampai dengan 2016.

Berdasarkan hasil pengamatan, dan mempelajari laporan realisasi anggaran (LRA) badan pengelolaan dan keuangan aset daerah (BPKAD) Musi Banyuasin. Maka peneliti akan melakukan analisis data laporan realisasi anggaran (LRA) Dari Tahun 2012- 2016 yang ditunjukkan bahwa anggaran pendapatan dari tahun 2012-2013 dbisa dikatakan sangat efektif, dan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dikatakan cukup efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2014, 2015 dan 2016 mengalami penurunan, dibandingkan dengan target PAD.

D.2 Pembahasan

D.2.1 Pembahasan Hasil Analisis rasio Efektifitas

D.2.2 Analisis RasioEfektivitas PAD

Pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan menggambarkan tingkat kinerja pihak manajemen dan mempengaruhi kinerja keuangan entitas yang bersangkutan. Oleh karena pentingnya mengetahui efektivitas realisasi anggaran maka perlu adanya analisis rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan keefektifan pencapaian target dengan cara membandingkan antara target anggaran dan realisasinya selama satu periode akuntansi.

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

a. Tahun 2012 = $\frac{2.580.875.509.082,88}{2.325.660.452.672,00} \times 100\%$
 = 110,97%

b. Tahun 2013 = $\frac{3.067.053.341.618,98}{2.930.291.085.193,99} \times 100\%$
 = 104,66%

c. Tahun 2014 = $\frac{3.143.669.713.584,51}{3.466.891.379.395,91} \times 100\%$
 = 90,67%

d. Tahun 2015 = $\frac{2.034.401.344.567,62}{2.506.193.141.320,85} \times 100\%$
 = 81,17%

e. Tahun 2016 = $\frac{2.640.255.197.404,59}{2.849.225.683.981,23} \times 100\%$
 = 92,66%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka rasio efektivitas realisasi anggaran pendapatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 33 berikut ini:

Tabel 2
Rasio Efektivitas Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016.

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektifitas	Kriteria	Analisis Efektifitas
2012	2.325.660.452.672,00	2.580.875.509.082,88	110,97%	>100%	Sangat efektif
2013	2.930.291.085.193,99	3.067.053.341.618,98	104,66%	>100%	Sangat efektif
2014	3.466.891.379.395,91	3.143.669.713.584,51	90,67%	90-99%	Cukup Efektif
2015	2.506.193.141.320,85	2.506.193.141.320,85	81,17%	75-89%	KurangEfektif
2016	2.849.225.683.981,23	2.640.255.197.404,59	92,66%	90-99%	Cukup Efektif

Data diolah 2017.

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi

Banyuasin pada tahun 2012 sampai 2013 dinilai sangat efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar 110,97%,

104,66,. Hal ini disebabkan realisasi anggaran pendapatan, tahun 2012 dan 2013 lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendapatan sehingga dapat dikatakan sangat efektif, dan realisaasinya sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 2016 rasio efektivitas pendapatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dinilai cukup efektif, hal ini dikarenakan anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan sehingga dinilai cukup efektif. Dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu hanya mencapai 90,67% dan 81,17%. Hal ini disebabkan anggaran pendapatan lebih kecil dari target anggaran pendapatan.

D.2.3 Analisis Rasio Efisiensi PAD

Pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan menggambarkan tingkat kinerja pihak manajemen dan mempengaruhi kinerja keuangan entitas yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak hanya mengetahui tingkat efisiensi, tetapi mengetahui tingkat efisiensi realisasi anggaran juga perlu dilakukan. Rasio efisiensi menggambarkan keefisienan pencapaian target dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan

pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.(PAD).

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

a. Tahun 2012 = $\frac{104.739.388.900,00}{440.305.233.824,92} \times 100\%$
= 23,78%

b. Tahun 2013 = $\frac{106.002.794.900,00}{477.020.871.018,80} \times 100\%$
= 22,22%

c. Tahun 2014 = $\frac{61.200.000.000,00}{515.191.313.508,69} \times 100\%$
= 11,87%

d. Tahun 2015 = $\frac{35.000.000.000,00}{127.427.510.758,15} \times 100\%$
= 27,46 %

e. Tahun 2016 = $\frac{16.175.000.000,00}{30.399.429.018,77} \times 100\%$
= 53,20 %

Berdasarkan perhitungan di atas, maka rasio efisiensi realisasi anggaran pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Rasio Efisiensi Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efisiensi	Kriteria	Analisis Efisiensi
2012	440.305.233.824,92	104.739.388.900,00	23,78%	21-30%	Cukup Efisien
2013	477.020.871.018,80	106.002.794.900,00	22,22%	21-30%	Cukup Efisien
2014	515.191.313.508,69	61.200.000.000,00	11,87%	10-20%	Efisien
2015	127.427.510.758,15	35.000.000.000,00	27,46%	21-30%	Cukup Efisien
2016	30.399.429.018,77	16.175.000.000,00	53,20%	>40%	Tidak Efisien

Data diolah 2017.

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efisiensi pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012 sampai 2016 dinilai cukup efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran PAD, hal ini dikarenakan target anggaran jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan,

sehingga rasio efisiensi pendapatan secara keseluruhan dinilai cukup efisien. yaitu sebesar 23,78%, 22,22%, 11,87%, 27,46% dan 53,20%. Hal ini disebabkan realisasi pengeluaran pendapatan lebih besar dari realisasi penerimaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

E.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), maka kinerja keuangan untuk anggaran pendapatan dari tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan sudah sangat efektif, karena sudah mencapai lebih dari 100%. Untuk pendapatan tahun 2014-2016 dikatakan cukup efektif karena realisasinya kurang dari 100%.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menghitung anggaran pendapatan untuk PAD tahun 2012-2013 dikatakan sangat efektif, dan untuk tahun 2014-2016 dikatakan cukup efektif. Sedangkan untuk efisiensi PAD tahun 2012, 2013 dan 2015 dikatakan cukup efisien, tahun 2014 dikatakan efisien dan untuk tahun 2016 dikatakan tidak efisien.

E.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pendapatan dan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) harus dipertahankan, karena dinilai sudah sangat efektif dalam menjalankan kinerjanya.
2. Untuk kinerja berdasarkan laporan realisasi anggaran PAD untuk tahun 2014- 2016 dinilai cukup efektif, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya agar lebih efektif lagi untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pegantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Dien, A.N.J, Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw.2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. (online). Vol.3 No.1.(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7245>, diakses 02 Februari 2017)
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Herry, Goenawan Soedarso Dan Avriana Tryasmarini Dwi Putri. 2014 . Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Provinsi Lampung . Vol. 5 No 2. ([Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php). Diakses 03 Maret 2017)
- Honga, Ardon Fridolin, Ventje Ilat. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. (online). Vol.2. No 4. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6263>, diakses 03Februari 2017)
- Kema, Ihwan.2013. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. (Online). Vol.1 No.3. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2215>,diakses 15 Februari 2017)
- Mahmudi.2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN
- Nordiawan Deddi, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Niu Fitria Ayu Lestari, Herman Karamoy, dan steven tangkuman. 2014. analisis penerapan PP No. 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah kota kotamobagu. (Online). Vol.2.No.4.(<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=292019>, diakses 10 Februari 2017)

Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan.

Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). (online). Vol. 7. No. 13. (<http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/97>, diakses 02 Februari 2017)

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Sugiono, 2012 *Metodologi Penelitian bisnis*. Bandung. Alfabeta.

Sanusi, 2014 *Metodologi Penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat